



RUSUH USAI SYL DIVONIS 10 TAHUN BUI Dicoret Nasdem, Dipolisikan Wartawan

Kasus mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) menimbulkan polemik baru usai vonis dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024). Saat majelis hakim membacakan hukuman 10 tahun penjara untuk politisi tersebut beberapa orang diduga ormas pendukung SYL membuat kerusuhan. Situasi saling berdesakan terjadi di dalam ruang sidang hingga menyebabkan pagar pembatas rusak. Wartawan yang menjadi korban kekerasan pun melapor ke Polda Metro Jaya. Sementara terkait kasusnya, pihaknya akan berpikir untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Bahkan setelah mendengar vonis, SYL bersikukuh dia tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti izin impor ataupun bagi-bagi proyek. SYL berpandangan, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan pembelian barang-barang yang dibeli oleh dirinya dan keluarga bersumber dari hasil pemerasan. Selain hukuman penjara, SYL didenda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Dia dinilai terbukti melakukan korupsi dengan memeras para pegawai Kementerian Pertanian (Kementan). Partai Nasdem juga angkat suara dengan menegaskan SYL kini sudah tidak lagi berstatus sebagai kader setelah dinyatakan bersalah di mata hukum.

**Government (Hal.3)
Proyek Pusat Data
Nasional Cikarang
Rp 2,7 T Tetap
Dilanjutkan**

Baca di hal 11....

ALIRAN UANG SYL YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1. Rp820 juta disetor Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni pada 8 Desember 2023 ke rekening KPK. Uang tersebut diberikan SYL kepada Partai NasDem untuk pendaftaran Bacaleg 2023, bersumber dari pejabat eselon I Kementan.
2. Rp40 juta disetor Fraksi NasDem sebagai dana kemanusiaan pada 7 Maret 2024. Uang tersebut diberikan SYL kepada Fraksi NasDem untuk pendaftaran Bacaleg 2023, bersumber dari pejabat eselon I Kementan.
3. Rp20 juta disetor penyanyi Nayunda Nabila Nizrinah pada 11 Desember 2023. Uang dari SYL yang bersumber dari pejabat eselon I Kementan.
4. Rp20 juta disetor Nayunda Nabila Nizrinah pada 13 Mei 2024. Uang dari SYL yang bersumber dari pejabat eselon I Kementan.
5. Rp30 juta disetor Nayunda Nabila Nizrinah pada 21 Mei 2024 ke rekening KPK. Uang dari SYL yang bersumber dari pejabat eselon I Kementan.
6. Rp253 juta disetor oleh Kemal Redindo Syahrul pada 25 Juni 2024. Uang diperoleh keluarga SYL dari pejabat eselon I Kementan RI.
7. Rp293.295.000 disetor Indira Chunda Thita S pada 25 Juni 2024. Uang diperoleh keluarga SYL dari pejabat eselon I Kementan RI.



VONIS 10 TAHUN SYHARUL YASIN LIMPO

- PENJARA 10 TAHUN**
Tuntutan Jaksa 12 Tahun
- DENDA RP 300 JUTA**
Tuntutan Jaksa Rp 500 Juta
- UANG PENGGANTI RP 14.4 M + USD 30 RIBU**
Tuntutan Jaksa Rp 44.2 M + USD 30 Ribu

Pengembalian Rp 1,47 miliar dari berbagai pihak ke KPK

1. Rp860 juta dari Partai NasDem: Rp820 juta untuk pendaftaran Bacaleg 2023 yang diberikan SYL kepada Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, dan Rp40 juta dana kemanusiaan yang dikembalikan oleh Fraksi Partai NasDem. Semua telah disetorkan ke rekening KPK.
2. Rp70 juta dari Nayunda Nabila Nizrinah: disetorkan dalam tiga kali, dua kali masing-masing Rp20 juta dan terakhir Rp30 juta.
3. Rp546,2 juta dari anak-anak SYL: Indira Chunda Thita menyeter Rp293,2 juta dan Kemal Redindo Syahrul menyeter Rp253 juta ke rekening KPK.

Setelah Kebocoran, Proyek Pusat Data Nasional Cikarang Rp 2,7 T Tetap Dilanjutkan

JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan bahwa proyek pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) tetap dilanjutkan meski ada serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Akibat ransomware tersebut membuat file instansi pemerintah yang tersimpan di PDNS 2 Surabaya, Jawa Timur, tidak bisa diakses dan berdampak sehingga mengakibatkan sempat terhentinya layanan publik.

Adapun, keberadaan PDNS tersebut karena Pusat Data Nasional yang lokasinya ada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, masih dalam proses pembangunan, Plt Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Ismail memastikan hal tersebut tetap berjalan meski ada insiden serangan siber.

"Lanjut," tegas Ismail dikutip Kamis (11/7/2024).

Terkait lebih lanjut soal proyek termasuk peresmian PDN Cikarang tersebut, Ismail mengungkapkan itu masih dalam pembahasan pemerintah.

Diberitakan sebelumnya, saat melakukan peninjauan pada Februari 2024, Kominfo menargetkan pembangunan PDN Cikarang tuntas pada Agustus 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan turut meresmikan PDN tersebut.

Percepatan pembangunan PDN dilakukan dengan metode design, suplay dan instalation. Setelah desain disetujui secara paralel proses lain mengikuti untuk mengejar waktu dan menjaga kualitas pekerjaan.

PDN Cikarang berada di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang dengan luas kurang lebih 15.994 m2. Proyek tersebut merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR 164.679.680 atau sekitar Rp 2,7 Triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

"PDN di Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt pada kesempatan operasi optimal," jelas Plt. Direktur LAIP Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Aris Setiawan.

Adapun, pemerintah menargetkan memiliki tiga Pusat Data Nasional yang tersebar di Cikarang (Jawa Barat), Batam (Kepulauan Riau), dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebanyak, 30 layanan publik dinyatakan telah pulih pasca serangan ransomware yang sempat melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya bulan lalu. Diketahui, serangan ini berdampak pada 167 Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D).

Layanan berbasis digital instansi



Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang dikebut pengerjaannya, ditarget selesai Agustus 2024. (Dokist)

memang terhubung dengan server PDNS 2 Surabaya —sebelum bermigrasi pada PDN dengan target operasi Agustus 2024— dan beroperasi melalui jaringan komputasi awan (cloud-computing).

Percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

Recovery puluhan layanan ini terjadi pada pukul 19.00 WIB, hari Selasa (9/7/2024), berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

30 layanan yang pulih berasal dari 12 Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D). Seluruhnya telah berhasil live. "Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih," cerita Hadi lewat dokumen tertulis.

"Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan K/L/D yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati," ujarnya.

Sebelumnya, Pejabat Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan sebelumnya menyebut hacker yang menyusup dan mengaktifkan malware pada pusat data (PDN) berisiko terhadap gangguan di 210 instansi.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Samuel mengumumkan gaya hidupnya pada 4 Juli lalu. Jabatan Dirjen Aptika Kominfo kini dijabat oleh Plt Ismail, yang juga merupakan Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo.

"Berdasarkan hasil survei dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah PDNS 2, sebanyak 167 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terdampak," kata Hadi dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan, Kamis (11/7/2024).

Erick Thohir Minta Pegawai Telkom Diusut

Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong adanya investigasi terhadap pegawai Telkom yang terindikasi lalai. Kelalaian tersebut disebut-sebut membuat sistem pusat data nasional (PDN) diserang

ransomware.

Erick menegaskan, pihaknya mendorong adanya pembersihan individu yang korupsi dan tidak baik.

"Kan baru indikasi. Saya mendorong yang namanya investigasi audit. Tapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional. Mendorong pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik, ya kita dorong," kata Erick di Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024) kemarin.

Imbas bobolnya sistem PDN, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya. Erick Thohir pun menyatakan, dirinya mendukung kebijakan koreksi yang telah diambil terhadap pihak yang dianggap tidak kompeten.

"Kan kemarin sudah mundur dirjennya dari Kominfo. Saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten. Dan itu sesuai arahan Presiden. Pak Budi Ari sudah melakukan. Yang pasti, kita mendukung. Kalau ada yang tidak kompeten, ya kita copot juga," katanya.

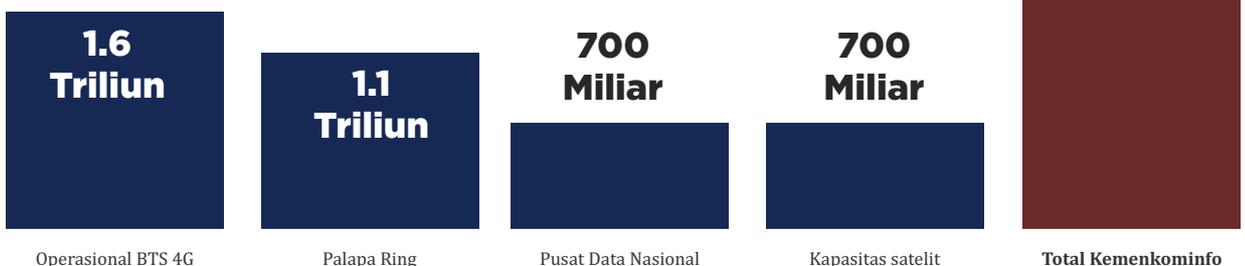
Sebagai informasi, Samuel mengatakan dirinya mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 oleh Brain Chipper.

Sebagai Dirjen Aptika, Samuel merasa memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kasus peretasan PDNS 2. Karena itu, dia mengambil tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri.

"Kejadian ini, bagaimanapun juga, secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu secara teknis, jadi saya mengambil tanggung jawab ini dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Ini masalah yang harusnya saya tangani dengan baik, itu adalah alasan," kata Samuel di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (4/7/2024). (tro,ant,ist,kum/dya)

RINCIAN DAN TOTAL REALISASI ANGGARAN TEMATIK INFRASTRUKTUR DALAM APBN UNTUK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (MEI 2024)

Sumber : Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (Rupiah)



RUU Wantimpres, DPR Kejar Target Rampung di Era Jokowi

JAKARTA - DPR RI telah menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Pengesahan pun tampaknya mengejar target selesai di era Jokowi.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan proses pembahasan revisi UU itu akan dilakukan pada masa sidang selanjutnya setelah sidang tahunan 16 Agustus mendatang.

"(Revisi UU Wantimpres) Tadi kan baru masuk paripurna," ujar Puan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Puan mengatakan DPR telah memasuki masa reses saat ini. Sebagai informasi, DPR RI menjalankan masa reses mulai 12 Juli hingga 15 Agustus 2024. Setelah itu, DPR akan menggelar sidang tahunan pada 16 Agustus 2024.

"Besok kita masuk masa reses, jadi kita akan bahas nanti sesudah masa sidang yang akan datang," ujarnya.

Puan berharap pembahasan RUU Wantimpres tidak menabrak ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. RUU Wantimpres akan membahas perubahan nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Struktur DPA dalam pemerintahan ada di masa Orde Baru dan tercantum dalam UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan.

"Yang pasti jangan sampai kemudian nanti hal yang akan kita bahas ini kemudian menyalahi UU apalagi UUD," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (11/7).

Dia berharap revisi UU Wantimpres dapat menguatkan posisi pertimbangan Presiden tanpa menyalahi aturan dalam UUD.

"Bagaimana seperti apa ini

harapannya itu adalah penguatan dari Wantimpres jadi saya harapkan nanti seperti apa namanya bentuk dari lembaga tersebut, ya kita lihat nanti pembahasannya kita sekarang ini masuk dari paripurna pembahasannya akan kita kaji jangan sampai menyalahi aturan perundangan yang berlaku," tutur dia.

Diketahui, DPR RI menyetujui Revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam paripurna penutupan masa sidang V tahun sidang 2023-2024.

Rapat digelar di gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7). Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel.

"Tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR RI?" tanya Lodewijk yang dijawab

setuju oleh anggota Dewan yang lain.

Mencuat Unsur Pesanan

Salah satu usulan perubahan dalam RUU itu yakni mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Menanggapi kilatnya proses RUU Wantimpres, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut kemunculan RUU Wantimpres di penghujung periode dinilai untuk persiapan pemerintahan baru yang akan datang.

"Beberapa RUU sebelumnya juga dibahas untuk kepentingan yang sama seperti RUU Kementerian Negara, RUU polri, RUU TNI dll," tegas Lucius.

"Jadi jelas unsur pesanan dalam perencanaan dan pembahasan RUU-RUU tersebut sangat jelas terlihat," tambahnya.

Dengan sisa waktu masa bakti DPR yang tinggal satu masa sidang lagi, Lucius mengatakan pembahasan RUU-RUU cuma untuk mengakomodir pesanan pemerintahan yang akan datang saja.

"Bahaya segera terlihat ketika UU hanya dibuat untuk memenuhi pesanan. Sulit rasanya melihat hasil yang berkualitas atau terakomodirnya kepentingan publik. Bahkan sekedar untuk melibatkan publik dalam proses pembahasan pun rasanya sulit," tuturnya.

Lucius menyayangkan DPR kali ini akan tercatat menghasilkan produk legislasi yang rentan merusak konsolidasi demokrasi dengan menghadirkan UU yang hanya memuaskan kepentingan elite yang akan berkuasa. (tro,wid,rls,ist/dya)



Ketua DPR RI, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024). (ist)

Poin-poin Perubahan RUU WANTIMPRES

PASAL 1

Dijelaskan bahwa Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Perbedaan pasal ini dengan UU yang masih berlaku terletak pada penamaan Wantimpres. Perubahan itu yakni Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.

PASAL 8

BUNYI PASAL LAMA:

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, seseorang harus memenuhi 7 persyaratan:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- warga negara Indonesia;
- setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- mempunyai sifat kenegarawanan;
- sehat jasmani dan rohani;
- jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang

PASAL BARU:

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, seseorang harus memenuhi 8 persyaratan:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- warga negara Indonesia;
- setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- mempunyai sifat kenegarawanan;
- sehat jasmani dan rohani;
- jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.



Disita Uang Rp 300 Juta saat KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Jatim di Bangkalan

SURABAYA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah rumah salah satu anggota DPRD Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan, Madura. Sedikitnya ada uang senilai Rp300 juta yang disita.

Kabar penggeledahan itu dibenarkan oleh Fatkurrahman Ketua DPC PDIP Bangkalan. Bahwa rumah Mahud Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim didatangi lembaga antirasuah pada Selasa (9/7/2024) kemarin.

"Beberapa hari yang lalu saya di Jakarta. Jadi tidak tahu pasti masalah itu. Jadi sementara isunya seperti itu (ada penggeledahan)," ujar Fatkurrahman dikutip Kamis (11/7/2024).

Ketua DPC PDIP Bangkalan itu juga tidak menampik adanya kabar kalau KPK juga membawa sejumlah uang. Bahkan penyidik juga menyita sebuah ponsel.

"Yang saya tahu HP, dan uang pecahan Rp2 ribu, Rp5 ribu, Rp20 ribu. Ada sih yang seratusan tapi nggak banyak. (Rp300 juta) iya kurang lebih,"

ucapnya.

Meski begitu, Fatkhurrahman memastikan, Mahhud tidak diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Sebab, setelah penggeledahan dirinya masih bisa ketemu dengan Mahhud.

Dia mengaku terakhir bertemu dengan Mahhud pada Rabu (10/7/2024) pukul 14.00 WIB. Pertemuan itu untuk memastikan kabar penggeledahan di rumahnya.

"Tadi jam 2 saya sempat ketemu di kantor karena terkait dengan itu kan tentu sebagai partai kami ingin tahu kepastiannya kayak apa kronologisnya. Saya tadi sempat ketemu," ungkap dia.

Sesudah bertemu Mahhud siang tadi, Fatkhurrahman tidak tahu lagi kabar Mahhud. Hingga saat ini, ia juga belum berkomunikasi dengan Mahhud.

"Sejak (siang) tadi kita kan berpisah. Saya pulang duluan karena agak capek juga sih maknanya pulang duluan. Sampai saat ini saya tidak komunikasi," pungkask dia.

Sebelumnya, tim penyidik KPK mengkalim menetapkan empat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran 2021.

"Dari anggota DPRD ada empat orang (tersangka), kalau enggak salah," kata Alexander Marwata Wakil Ketua KPK saat dilansir dari Antara, Rabu (10/7/2024).

Sementara itu, Tessa Mahardika Juru Bicara KPK secara terpisah mengatakan bahwa tim penyidik KPK hari ini juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jatim.

Tetapi, pihaknya belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi



Rumah Mahhud, anggota DPRD Jatim dari Dapil XIV (Madura) yang dikabarkan digeledah KPK. (ist)

mana saja yang digeledah, maupun apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.

"Masih menunggu kegiatan rekan-rekan di lapangan selesai ya," ucapnya. (pra,ist,dya)

Staf Hasto Adukan Penyidik KPK ke Propam Polri

Kuasa Hukum Kusnadi, Petrus Selestinus di Propam Polri. (ist)



JAKARTA-Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi mengadukan penyidik KPK AKBP Rosa Purbo Bekti dan Priyatno ke Propam Polri. Pengaduan ini merupakan dugaan pelanggaran prosedur dalam penyitaan ponsel Kusnadi.s.

Di Mabes Polri, Kuasa Hukum Kusnadi, Petrus Selestinus, menjelaskan ada dua peristiwa yang diduga dilanggar oleh AKBP Rosa dan rekannya. Salah satunya terjadi pada 10 Juni 2024 saat Hasto diperiksa KPK terkait buronan Harun Masiku.

Saat itu, Kusnadi mengaku dipanggil AKBP Rosa untuk menyampaikan ponsel milik Hasto. Namun, AKBP Rosa malah menggeledah barang-barang pribadi Kusnadi tanpa memperlihatkan surat penggeledahan.

"Rossa meminta agar semua yang ada di dalam ransel dikeuarkan. Kusnadi berpendapat, 'kok saya digeledah'. Dibalas 'diam kamu'. Dibentak begitu Kusnadi mulai ciut nyalinya. Dibiarkan digeledah, tanpa memperlihatkan surat keterangan, penyitaan, dan juga tanpa menjelaskan Kusnadi ini 'saksi apa tersangka,'" ungkap Petrus, Kamis (11/7/2024).

Peristiwa kedua terjadi pada 19 Juni 2024, saat itu giliran Kusnadi yang dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Kala itu Kusnadi diminta menandatangani surat penerimaan barang bukti.

"Karena dalam pemahaman masyarakat kita pada umumnya dan pemahaman kami sebagai praktisi hukum, baik UU KUHAP maupun KPK, penyitaan dan penggeledahan secara mendadak dan paksa itu dilakukan terhadap tersangka," katanya.

Dia menegaskan status kliennya saat ini masih saksi. Penyitaan dinilai menyalahi prosedur.

"Padahal Kusnadi bukan tersangka, Hasto juga. Dia dipanggil sebagai saksi karena itu peristiwa yang dialami Kusnadi saat itu kami nilai diduga sebagai peristiwa tindak pidana dan diduga sebagai pelaku Rossa Purba Bekti dan Priyatno, keduanya penyidik KPK," ujarnya.

Kusnadi sebelumnya juga

melaporkan penyidik Rosa Purba Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Penyidik dinilai tidak profesional.

"Melaporkan penyidik atas ketidakprofesional melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang milik Saudara Kusnadi dan Sekjen PDIP Mas Hasto Kristiyanto," kata kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy saat menyampaikan laporan tersebut ke Gedung Dewas KPK, Senin (10/6/2024) malam.

KPK Pertimbangkan Pakai Tim Hukum

Jakarta - KPK merespons soal banyaknya pelaporan atas salah satu penyidikinya, AKBP Rosa Purbo Bekti, yang menangani kasus Harun Masiku. KPK mempertimbangkan akan menerjunkan tim hukum untuk mendampingi Rossa.

"Itu nanti akan dinilai, apakah memang diperlukan, untuk menerjunkan Biro Hukum," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Tessa mengatakan banyaknya pelaporan atas AKBP Rosa mengganggu rencana penyidikan kasus Harun Masiku. Namun dirinya menegaskan proses penyidikan dalam kasus itu akan terus berjalan.

"Tentunya mengganggu rencana penyidikan yang sudah dibuat karena

yang bersangkutan harus memenuhi panggilan-panggilan tersebut," kata dia. (qid,rls,ist/dya)

PROFIL ROSSA PURBO BEKTI

- Rossa Purbo Bekti merupakan penyidik KPK dari Polri yang saat ini berpangkat perwira menengah tingkat dua alis Ajun Komisaris Besar Polisi, disingkat AKBP.
- Lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol pada 2006 ini bergabung dengan KPK sejak 2016 silam.
- Rossa pernah menangani kasus e-KTP yang menjerat banyak pejabat negara.
- Rossa juga turut dalam tim yang melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus suap Harun Masiku.
- Rossa pemimpin dalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.



Buntut Ketua KPU Dipecat Komnas HAM Minta Penyelenggara Pemilu Bentuk Satgas TPKS

Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta lembaga-lembaga penyelenggara pemilu untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di lembaganya masing-masing. Hal ini disampaikan komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menyikapi pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang terbukti melakukan tindak asusila kepada petugas Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN).

"Komnas HAM mendesak lembaga penyelenggara pemilu Membentuk Satgas di masing-masing lembaga penyelenggara pemilu, untuk melaksanakan fungsi pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual," ujar Pramono dalam keterangan pers, Kamis (11/7/2024).

Pramono menyatakan, KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai institusi demokrasi semestinya menjadi ruang yang aman dan bebas bagi perempuan untuk menjalankan seluruh aktivitas.

Komnas HAM juga mendesak agar seluruh lembaga penyelenggara pemilu mengimplementasikan Undang-Undang TPKS. Caranya dengan menyusun komitmen kebijakan untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan dituangkan dalam bentuk peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan peraturan DKPP.

Mantan anggota KPU itu juga meminta penyelenggara pemilu mengevaluasi regulasi dan kebijakan terkait komitmen pemenuhan hak politik perempuan secara menyeluruh.

"Terutama terkait dengan keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan partai politik, dalam proses pencalonan DPR/DPD, serta dalam komposisi KPU/Bawaslu di Tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota," tandas kata Pramono.

Sebelumnya, DKPP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Rabu (3/7/2024). Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Dia mengharapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tentang pemberhentian tidak hormat Hasyim Asy'ari itu juga jadi pengingat bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik.

"Keppres tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kembali komitmen dalam memerangi tindak kekerasan seksual yang merendahkan

dan mendiskriminasi hak-hak perempuan sebagai korban serta memberikan jaminan keadilan bagi korban," kata Ubaid.

Terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai pemberhentian tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari lantaran kasus asusila sebagai bentuk kurangnya pengawasan internal. Pernyataan ini bukan tanpa sebab, karena sebelum-sebelumnya KPU juga sering melakukan pelanggaran.

"Pak Hasyim yang diberhentikan oleh DKPP itu kan puncaknya, tapi sebelum-sebelumnya kalau dikaitkan dengan pelanggaran etika KPU itu sudah berulang kali mendapatkan sanksi etik oleh DKPP dengan berbagai macam kasus," kata Khoirunnisa.

Dia menilai ada masalah terkait profesionalisme, etika, dan integritas yang harus segera dibenahi. Khoirunnisa menerangkan jangan sampai publik menilai penyelenggara pemilu saat ini tidak layak

Dia menerangkan pengawasan internal di KPU sangat dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran. Bukan hanya pengawasan dari Dewan



komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tapi KPU perlu punya pengaduan internal.

"Dalam mengawasi sesama ini apakah juga dilakukan saling mengawasi, dibuat enggak mekanisme internalnya? Misalnya untuk melapor kemana gitu, bertemu dengan siapa, di mana?" ucap Khoirunnisa.

Khoirunnisa mengatakan sebagai lembaga yang dituntut untuk independen dan berintegritas, KPU harus memiliki kontrol. Jika masih saja terjadi pelanggaran, kata dia, menunjukkan pengawasan internal di KPU belum maksimal. (tro,wi,ant/dya)

Geger PPP, Mardiono Pecat Seluruh Pengurus DPW Bali



Pengurus DPW PPP Provinsi Bali menyampaikan keberatan atas pemecatan terhadap Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni. dok

DENPASAR- Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bali, di bawah kepemimpinan Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni diklaim dipecat oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP Mardiono secara sepihak.

Usai pemecatan, Idy dan Thobahul mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (11/7/2024) untuk menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Mardiono.

Idy menilai pemecatan tersebut

dilakukan secara sewenang-wenang. Hal itu, dia ketahui setelah melihat di media sosial atas perintah oknum pengurus DPP disebarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali.

"Kami jelas menyatakan keprihatinan yang mendalam, menolak dan menyesalkan sikap DPP tersebut. Masak kami tahu SK pemecatan tersebut dari medsos? Apa begini cara berorganisasi yang benar? Alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini kan zalim namanya," kata Idy.

Idy mengklaim saat Pemilu 2024, PPP mendapatkan kenaikan kursi 100 persen di DPRD kabupaten. Idy juga mengaku belum menerima panggilan, surat peringatan, ataupun surat pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali.

Artinya, keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui

mekanisme organisasi yang benar menurut AD/ART PPP yang berlaku dan mengabaikan etika organisasi bernafas Islam. "PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya tabayun dahulu. Ini kan tidak, main pecat-pecat saja. Organi-sasi kelas kampung saja ada aturan mainnya," ungkapny.

"Seluruh Plt DPW PPP Bali itu ada lima orang, karena di Plt iya semuanya (dipecat)," tambahnya.

Idy kemudian tak bisa berkomentar soal dugaan pemecatan karena tak mendukung Mardiono menjadi Ketua Umum di periode selanjutnya. "Kan maju aja belum tentu (Mardiono). (Apa mendukung) iya belum tahu, kan belum maju kok," ujarnya sambil tertawa.

Saat ini, kata Idy, pihaknya masih nunggu respons DPP PPP termasuk bukti secara fisik surat pemecatan pengurus PPP di Bali.

Terkait Muktamar Luar Biasa!

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan pencopotan sejumlah pengurus DPW PPP Bali baru-baru ini tak terkait dengan isu Muktamar Luar Biasa yang meminta Plt Ketua Umum

Muhamad Mardiono mundur.

Awiek, sapaan akrabnya, mengatakan isu Muktamar bukan hanya didorong oleh DPW Bali, namun juga oleh beberapa simpul partai yang lain termasuk badan otonom organisasi. Namun, tak ada pencopotan terhadap mereka. Menurut Awiek, pencopotan tersebut murni untuk restrukturisasi partai dan mengoptimalkan kerja-kerja partai.

"Kan yang mengusulkan Muktamar tidak hanya Bali, ada sejumlah banom juga. Kan enggak ada tindakan itu," kata Awiek saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Dia lebih lanjut tak mempermasalahkan protes yang disampaikan Plt Ketua Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris M Thobahul Aftoni buntut pemberhentian keduanya. Awiek bilang hal itu normal saja dan bagian dari dinamika organisasi.

Menurut Awiek, Idy dan Toni usai diberhentikan sebagai pengurus DPW akan dikembalikan ke DPP. Keduanya, menurut dia, dianggap telah sukses mengawal DPW Bali selama ini, sehingga mereka akan ditarik kembali ke DPP. (ant,wid,ist/dya)

Rekomendasi PDIP Belum Turun, Sanusi Diberi Surat Tugas Konsolidasi Jelang Pilbup Malang



Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto. (Santi/Lenteratoday)

“
Kami berharap Bupati Sanusi, sebagai kader PDI Perjuangan dan incumbent yang mencalonkan diri lagi, dapat terus berinteraksi langsung dengan masyarakat,”

MALANG - Bupati Malang, Sanusi menerima surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun bukan rekomendasi, melainkan tugas untuk melakukan konsolidasi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang November mendatang.

Surat tersebut berisi penegasan untuk fokus pada komunikasi dan konsolidasi dalam rangka menghadapi kontestasi politik mendatang.

Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, Kamis (11/7/2024). Didik mengatakan, Kabupaten Malang

termasuk dalam salah satu dari 11 daerah prioritas di Jawa Timur yang telah diberi penugasan serupa.

"Kami berharap Bupati Sanusi, sebagai kader PDI Perjuangan dan incumbent yang mencalonkan diri lagi, dapat terus berinteraksi langsung dengan masyarakat," ujar Didik.

Didik menambahkan, dari total 38 daerah, Kabupaten Malang dipilih karena strategisnya posisi Sanusi dalam konteks politik lokal. Menurut Didik, surat tugas tersebut menginstruksikan Sanusi untuk aktif melakukan konsolidasi internal dan menjalin komunikasi lintas partai politik.

Didik juga mengharapkan, upaya ini dapat memperkuat posisi PDI Perjuangan dan memenangkan kepercayaan masyarakat pada Pemilihan Bupati Malang di 27 November mendatang.

Lebih lanjut, Didik menekankan bahwa kesuksesan Sanusi dalam Pilkada tidak hanya akan bergantung pada dukungan internal partai. Tetapi juga pada kemampuannya untuk

menarik simpati dan dukungan luas dari seluruh komponen masyarakat Kabupaten Malang.

Oleh karena itu, menurutnya surat tugas yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan tidak hanya merupakan instruksi formal, tetapi juga sebuah tantangan bagi Sanusi untuk membuktikan kapabilitas dan komitmen politiknya. Dalam memimpin Kabupaten Malang untuk periode 2024-2029 nanti.

Di sisi lain, disinggung perihal pemberian rekomendasi bagi Sanusi atau Gunawan Wibisono, Didik menegaskan keputusan tersebut berada di tangan DPP PDI Perjuangan.

Didik hanya menggarisbawahi, survei elektabilitas, kapabilitas, dan popularitas keduanya menjadi faktor penentu sebelum rekomendasi diberikan.

"Kami masih menunggu keputusan dari pusat terkait rekomendasi tersebut. Informasi yang kami terima, rekomendasi diharapkan akan diberikan dalam bulan-bulan depan ini, lah," tutup Didik. (Santi/Dya)

Jumlah Siswa Baru SD Minim, Disdikbud Kota Malang Duga Akibat Redahnya Kelahiran



Jadi di juknis, itu mengatakan manakala sampai akhir PPDB itu pagu di SDN masih ada yang kurang, maka sekolah bisa membuka PPDB secara offline sampai pagunya terpenuhi,"

....

DODIK TEGUH PRIBADI

Kabid Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang,

MALANG - Jumlah peserta didik baru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Malang tahun ini minim. Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Dodik Teguh Pribadi, menduga dipicu rendahnya tingkat kelahiran.

Untuk mengatasi masalah ini, Disdikbud Kota Malang telah membuat kebijakan baru. SDN yang masih belum memenuhi pagu peserta didik baru, diperbolehkan membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara luring atau offline.

Dodik menyebutkan, hingga saat ini masih ada 100 dari total 195 SD Negeri di Kota Malang yang mengalami kekurangan siswa. "Jadi di juknis, itu mengatakan manakala sampai akhir PPDB itu pagu di SDN masih ada yang kurang, maka sekolah bisa membuka PPDB secara offline sampai pagunya terpenuhi," ujar Dodik, Kamis (11/7/2024).

Salah satu persyaratan dalam PPDB jenjang SD adalah Kartu Keluarga (KK) yang harus beralamat di Kota Malang. Menurut Dodik, calon siswa yang berdomisili di luar Kota Malang harus menunggu pembukaan PPDB offline untuk dapat mendaftar ke SD Negeri di Kota Malang.

"Jadi kalau ada SD yang masih

belum memenuhi pagu, bisa ditunggu sampai ditutupnya PPDB di tanggal 15 Juli nanti," ungkapnya.

Situasi ini, kata Dodik, sudah sering terjadi setiap tahun, dan biasanya sekolah-sekolah berhasil memenuhi pagu mereka setelah PPDB luring dibuka.

Lebih lanjut, Dodik juga menyoroti beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah peserta didik baru untuk jenjang SD. Salah satunya yakni rendahnya tingkat kelahiran penduduk, sehingga berakibat pada berkurangnya anak usia SD.

"Kalau menurut saya, ya program Keluarga Berencana (KB) nya berhasil. Sehingga memang masyarakat sudah gak ada anak usia SD lagi," paparnya.

Selain itu, Dodik juga menyebutkan adanya wilayah di Kota Malang dengan banyak sekolah yang berdekatan, sehingga orang tua cenderung memilih sekolah yang dianggap lebih baik.

Kondisi ini, sambung Dodik, menunjukkan perlunya strategi



Ilustrasi: Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana saat meninjau kegiatan belajar mengajar di SDN 3 Bareng. (Santi/Lenteratoday)

pemasaran dan peningkatan kualitas di setiap sekolah untuk menarik minat orang tua dan siswa. "Ini juga bergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk mengekspose sekolahnya. Seperti di SDN Polehan 3, itu kan dulu favorit, sekarang kalah dengan SDN Polehan 4," tukasnya. (Santi/Dya)

Konser tunggal **ANGGUN C. SASMI** digelar di Jakarta pada 28 Juli

PENYANYI Anggun selama ini lebih banyak manggung di luar negeri mengingat dia sudah tinggal dan menetap di Paris, Prancis. Kendati demikian, Anggun tidak pernah melupakan tanah kelahirannya, Indonesia.

Salah satu buktinya, Anggun secara spesial akan menyapa para penggemar di Tanah Air dengan menggelar Konser tunggal penyanyi Anggun C. Sismi yang bertajuk "#enchantingANGGUN" akan digelar di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), pada 28 Juli 2024.

Menurut siaran pers promotor Flashback Motion di Jakarta, Rabu (10/7/2024), Anggun akan membawakan lebih dari 20 lagu dengan iringan musik dari Andi Rianto dan Magenta Orchestra dalam konser tersebut.

Musisi Ian Antono serta penyanyi Ahmad Albar, Isyana Sarasvati, dan Fabio Asher juga akan tampil dalam konser Anggun.

"Bagi saya bernyanyi di panggung Indonesia memiliki kesan dan kenangan tersendiri, yang tidak dapat diungkapkan dengan banyak kata-kata," kata Anggun.

"Kecintaan saya terhadap Indonesia sedemikian dalam, juga kepada para fans di Indonesia yang tidak pernah saya lupakan," katanya.

Komposer sekaligus pemimpin Magenta Orchestra Andi Rianto telah menyiapkan sungguh kompilasi lagu-lagu hit Anggun dengan aransemen yang diperbaharui.

"Dengan iringan orkestra, penonton akan merasakan immersive experience baik secara audio maupun visual dari diva dunia Anggun, khusus dipersiapkan bagi para fans di Tanah Air yang merindukan Anggun tampil di Indonesia," kata Andi.

Promotor menyampaikan bahwa pada tahap pertama penjualan tiket tanggal 21 April 2024, tiket konser dengan harga spesial habis terjual hanya dalam beberapa jam.

Konser tunggal Anggun ini memang sudah dinanti-nantikan para penggemarnya. Terbukti, sejak tahap

pertama penjualan tiket dibuka pada 21 April lalu, hanya dalam hitungan jam sudah terjual habis untuk alokasi tahap pertama dari total keseluruhan tiket yang dijual. Baik tiket untuk kelas VVIP, VIP, Festival, maupun Tribune.

Saat ini, tiket konser "#enchantingANGGUN" kelas festival sudah habis terjual dan tiket VVIP tinggal beberapa. Tiket konser kelas VIP dan Tribune masih dapat dibeli melalui loket.com.

"Kami antusias dengan animo positif masyarakat yang telah sekian lama merindukan penampilan Anggun di Tanah Air, sebagai sosok superstar yang telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang pagelaran musik bergengsi internasional," kata Pendi dan Direktur Proyek Flashback Motion Umu Djoka Djawakoda.

Perjalanan Hidup dan Karier

Anggun mengawali perjalanan karir melalui single bertajuk "Mimpi" di akhir tahun 1989. Single tersebut membawa dirinya mulai dikenal khalayak luas.

Namanya kian melejit setelah ia merilis sederet single ternama seperti "Tua-Tua Keladi" dan "Takut".

Kedua single tersebut membawa Anggun meraih penghargaan sebagai "Artis Indonesia Terpopuler 1990-1991" dan menjadikannya sebagai salah satu penyanyi rock wanita tersukses di awal tahun 1990-an.

Tak puas berkarir di Indonesia, Anggun mulai fokus mencapai impiannya sebagai penyanyi bertaraf internasional.

Bersama dengan suaminya, Michel Georgea, seorang pria berkebangsaan Prancis, mereka tinggal di London, Inggris untuk memulai kariernya dari nol.

Setahun tinggal di Inggris, Anggun sadar bahwa Inggris bukanlah tempat yang tepat untuknya.

Ia akhirnya memutuskan untuk pindah berkarir di negara Eropa lainnya, hingga bertemu dengan Erick Benzi, produser berkebangsaan Inggris yang pernah menggarap album penyanyi ternama seperti Celine Dion.

Pertemuan itu menjadi awal karir

cemerlang bagi Anggun.

Anggun berhasil merekam album berbahasa Prancis pertama yang berjudul "Au nom de la lune" dengan single "La neige au Sahara".

Berkat lagu tersebut, Anggun berhasil menoreh sejarah sebagai artis berkebangsaan Indonesia pertama yang menembus tangga musik Billboard di posisi 16.



Di puncak kesuksesannya, Anggun akhirnya memutuskan untuk melepas kewarganegaraan Indonesia, karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menyulitkan dirinya selama mempromosikan album internasional pertamanya.

Dengan status kewarganegaraannya yang baru, Anggun kembali melanjutkan perjalanan karirnya dengan merilis album dan single terbaiknya.

Berkat kerja kerasnya tersebut, Anggun bisa menggapai mimpinya sebagai penyanyi internasional dan tampil bersama penyanyi-nyanyi kelas dunia, seperti Bryan Adams, DJ Cam, dan masih banyak lainnya. (nei,ist/dya)



Kecintaan saya terhadap Indonesia sedemikian dalam, juga kepada para fans di Indonesia yang tidak pernah saya lupakan,"



PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN LAMBUNG DI TENGAH TREN MAKANAN VIRAL

TREN makanan viral yang kini digandrungi oleh generasi Milenial dan Gen Z memerlukan perhatian khusus terhadap kesehatan lambung, demikian disampaikan dokter gizi dr. Putri Sakti Dwi Permanasari, Sp.GK.

Dalam rilis pers yang diterima, Selasa, dr Putri menyatakan bahwa konsumsi makanan pedas dan asam secara berlebihan, seperti mie setan level 10 dan steamboat pedas, dapat menyebabkan iritasi pada lambung.

Makanan-makanan tersebut memang menggugah selera, tetapi berpotensi meningkatkan risiko gastritis atau peradangan lambung. Selain makanan pedas, dr. Putri juga menyoroti kebiasaan makan cepat yang sering dilakukan generasi muda karena kesibukan.

Makan terlalu cepat dapat memicu peningkatan produksi asam lambung, yang bisa berujung pada gangguan pencernaan. Stres juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan lambung.

Stres yang berlebihan bisa meningkatkan produksi asam lambung, menyebabkan kondisi seperti GERD atau maag. Untuk mencegah komplikasi serius akibat gangguan lambung, dr. Putri merekomendasikan untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala seperti perut kembung, mual, muntah, atau maag.

dr. Putri juga menyarankan mengonsumsi makanan yang mudah dicerna seperti sayuran hijau, pisang,

dan yogurt, serta menghindari makanan pedas, asam, berlemak, dan gorengan. Bahan herbal seperti madu dan kunyit dapat membantu meredakan gangguan lambung berkat sifat anti-inflamasinya. dr. Putri juga menekankan pentingnya mengurangi stres melalui teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi.

Dengan pendekatan ini, tidak hanya kesehatan lambung yang terjaga dengan baik, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan dapat meningkat. Salah satu pilihan produk yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan lambung adalah Freshmag. Dengan formula bahan alami seperti madu dan kunyit, serta telah mendapatkan sertifikasi BPOM dan Halal Indonesia, Freshmag bisa

menjadikan pilihan bijak untuk melindungi lambung.

"Freshmag tidak hanya mendukung gaya hidup aktif mereka tetapi juga memberikan perlindungan optimal terhadap tantangan baru dalam dunia kuliner yang sedang populer," kata Direktur Utama PT Herbathos Untuk Indonesia Ahmad Zaini.

Freshmag yang berpartisipasi dalam gelaran Jakarta Fair 2024, mengajak masyarakat hadir di booth mereka pada 13 Juli untuk menyaksikan gelar wicara tentang kesehatan lambung yang dipandu oleh dr. Putri. Gelar wicara tersebut juga dapat disaksikan secara daring melalui Instagram resmi @freshmag.id pada pukul 16.00-17.00 WIB. (nei,ist/dya)



"pentingnya mengurangi stres melalui teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi. Dengan pendekatan ini, tidak hanya kesehatan lambung yang terjaga dengan baik, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan dapat meningkat.

dr. Putri Sakti Dwi Permanasari, Sp.GK.

DAFTAR MOBIL LISTRIK YANG DAPAT INSENTIF PPN TAHUN 2024

UNTUK mempercepat transformasi kendaraan listrik, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil listrik dan bus listrik.

Insentif diberikan melalui Kementerian Keuangan untuk mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu.

PPN mobil listrik dari yang tadinya 11 persen dikurangi menjadi hanya 1 persen. Kebijakan ini sudah berlaku sejak 2023, kemudian diperpanjang hingga 2024.

Kebijakannya tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Pada Pasal 2 ayat (1) PMK No. 8 Tahun 2024, disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu kepada pembeli ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2024.

Kemudian, pada Pasal 3 ayat (1) mobil listrik dan bus listrik tertentu yang mendapatkan insentif PPN harus memenuhi kriteria nilai TKDN, yakni minimal 40 persen.

Tahun lalu, yang mendapatkan insentif PPN hanya Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev. Ioniq 5 harganya turun hingga Rp 70 jutaan. Sedangkan Air ev, turun sekitar Rp 20 jutaan.

Untuk 2024, mulai banyak mobil

listrik yang diproduksi atau dirakit secara lokal. Wuling menambah dua model, yakni Binguo EV dan Cloud EV.

Menurut situs Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, nilai TKDN Binguo EV mulai 47,53 persen hingga 47,55 persen. Sementara Cloud EV, memiliki nilai TKDN 40 persen.

Ketiga mobil listrik tersebut diproduksi di pabrik PT SGMW Motor Indonesia. Pabrik tersebut juga merakit mobil listrik Morris Garage (MG), yakni MG 4 EV dan MG New ZS EV. Kedua model tersebut memiliki nilai TKDN 40 persen.

Lalu, meluncur juga mobil listrik dari China, yaitu Neta. Mobil listrik Neta V-II juga sudah dirakit secara lokal oleh PT Neta Auto Manufacturing Indonesia, dengan nilai TKDN 44 persen. Termasuk yang akan meluncur dalam waktu dekat, Neta X, punya nilai TKDN juga 44 persen.

Chery Omoda E5 sudah dirakit juga secara lokal oleh PT Chery Motor Indonesia. SUV listrik ini memiliki nilai TKDN hingga 40,5 persen. Bertambah juga Hyundai New Kona EV oleh PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dengan nilai TKDN mulai 40 persen hingga 40,01 persen.

Perhitungan Subsidi Kendaraan Listrik

Untuk mobil listrik, 2 merek yang dipastikan mendapatkan subsidi yaitu Hyundai Ioniq 5 dengan diskon Rp 70 - 80 juta dan Wuling Air ev dengan penurunan harga Rp 25 juta hingga Rp 35 juta.



Sedangkan untuk kendaraan roda 2, terdapat 38 line up motor yang mendapat subsidi pemerintah sebesar Rp 7 juta. Masyarakat hanya dapat memilih satu motor pilihannya karena subsidi ini berlaku hanya untuk satu orang. Pemerintah sudah memberi kuota sebesar 200 ribu unit, namun hingga kini baru tersalurkan kurang dari 1%.

Subsidi motor listrik seharusnya dapat lebih efisien diterapkan, mengingat subsidi untuk mobil memerlukan dana yang jauh lebih besar mencapai 3-11 kali lebih tinggi dibanding subsidi motor. Dengan lebih berfokus pada subsidi motor listrik, penyerapan subsidi seharusnya dapat lebih dimaksimalkan.

Hal tersebut didasarkan oleh

karakteristik masyarakat Indonesia yang secara keseluruhan lebih banyak memiliki kendaraan roda 2, dibanding roda 4. Melansir Gaikindo, data per 9 Februari 2023 menunjukkan, penggunaan mobil di Indonesia mencapai 19,17 juta unit atau dengan porsi 13%, sedangkan motor mencapai 127,97 juta unit atau mencapai 87%.

Selain itu, dari sisi harga, harga kendaraan roda 4 jauh lebih tinggi dibandingkan roda 2, sehingga menjadikan subsidi mobil listrik tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah atas, dibandingkan masyarakat kelas bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa subsidi yang diterapkan cenderung tidak tepat sasaran (Kompas/CNBC)



7 SIKAP MENYEDERHANAKAN HIDUP AGAR LEBIH BAHAGIA

Kebahagiaan sejati sering kali berasal dari hal-hal sederhana. Di tengah kesibukan dan tuntutan hidup yang semakin kompleks, menyederhanakan hidup dapat menjadi kunci untuk meraih kebahagiaan. Kebahagiaan bisa diupayakan melalui hal-hal sederhana, dan dengan sikap yang tepat, kita bisa menjalani hidup yang lebih bahagia dan penuh makna.

Hidup bahagia tidak selalu memerlukan kemewahan atau hal-hal besar. Justru, kebahagiaan sering kali ditemukan dalam hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Berikut ini tujuh sikap yang dapat membantu menyederhanakan hidup dan membawa kebahagiaan yang lebih mendalam. Semoga artikel ini bisa memberikan semangat hidup yang lebih positif, ya Sahabat Anda.

1. Menghargai Hal-Hal Kecil

Sikap pertama yang dapat membantu menyederhanakan hidup adalah belajar menghargai hal-hal kecil. Kebahagiaan tidak selalu harus datang dari pencapaian besar atau barang mewah. Sering kali, kebahagiaan justru muncul dari momen-momen sederhana seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari, melihat matahari terbenam, atau mendengarkan suara hujan. Dengan belajar menghargai hal-hal kecil, kita dapat menemukan kebahagiaan di setiap sudut kehidupan kita.

2. Mengurangi Ekspektasi yang Berlebihan

Sikap kedua adalah mengurangi ekspektasi yang berlebihan. Terkadang, kita terlalu banyak menuntut dari diri sendiri dan orang lain, yang pada akhirnya justru membuat kita merasa

tertekan dan tidak bahagia. Dengan mengurangi ekspektasi dan menerima keadaan apa adanya, kita dapat merasa lebih tenang dan puas dengan apa yang kita miliki. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki impian atau tujuan, tetapi lebih kepada menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna untuk membuat kita bahagia.

3. Fokus pada Hubungan yang Bermakna

Sikap ketiga adalah fokus pada hubungan yang bermakna. Dalam hidup yang sering kali dipenuhi dengan pertemanan superfisial dan interaksi online, penting untuk menyederhanakan dan memperdalam hubungan kita dengan orang-orang yang benar-benar berarti. Luangkan waktu untuk bersama keluarga dan teman-teman dekat, dan berikan perhatian penuh saat berinteraksi dengan mereka. Hubungan yang bermakna dapat memberikan kebahagiaan yang lebih mendalam dibandingkan dengan memiliki banyak kenalan yang dangkal.

4. Menghindari Konsumsi Berlebihan

Sikap keempat adalah menghindari konsumsi berlebihan. Dalam dunia yang serba materialistik, kita sering kali tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Mengurangi kebiasaan konsumtif dan hanya membeli apa yang benar-benar diperlukan dapat membantu kita merasa lebih ringan dan tidak terbebani oleh barang-barang yang tidak perlu. Selain itu, dengan menghindari konsumsi berlebihan, kita juga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

5. Melakukan Detoks Digital

Sikap kelima adalah melakukan detoks digital. Teknologi dan media sosial memang memiliki banyak manfaat, tetapi juga dapat menjadi sumber stres dan gangguan jika tidak digunakan dengan bijak. Cobalah untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di depan layar, terutama media sosial, dan gantilah dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti membaca buku, berjalan-jalan di alam, atau berbicara langsung dengan orang-orang terdekat. Dengan melakukan detoks digital, kita dapat merasa lebih fokus, tenang, dan bahagia.

6. Menyederhanakan Rutinitas Harian

Sikap keenam adalah menyederhanakan rutinitas harian. Rutinitas yang terlalu padat dan kompleks dapat membuat kita merasa lelah dan stres. Cobalah untuk mengatur jadwal yang lebih sederhana dan realistis. Prioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan hindari multitasking yang berlebihan. Dengan menyederhanakan rutinitas harian, kita dapat memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan melakukan hal-hal yang benar-benar kita nikmati.

7. Menerapkan Mindfulness

Sikap ketujuh adalah menerapkan mindfulness. Mindfulness adalah praktik untuk tetap sadar dan hadir di momen saat ini tanpa menghakimi. Dengan menerapkan mindfulness, kita dapat lebih menikmati setiap momen dalam hidup kita dan tidak terlalu terbebani oleh kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang

masa lalu. Cobalah untuk meluangkan beberapa menit setiap hari untuk bermeditasi atau sekadar duduk tenang dan merasakan pernapasan. Praktik mindfulness dapat membantu kita merasa lebih tenang, fokus, dan bahagia.

Menyederhanakan Hidup untuk Kebahagiaan yang Lebih Mendalam

Menyederhanakan hidup tidak berarti kita harus melepaskan semua keinginan dan ambisi kita. Sebaliknya, ini adalah tentang menemukan keseimbangan dan fokus pada apa yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita. Dengan menghargai hal-hal kecil, mengurangi ekspektasi yang berlebihan, fokus pada hubungan yang bermakna, menghindari konsumsi berlebihan, melakukan detoks digital, menyederhanakan rutinitas harian, dan menerapkan mindfulness, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih sederhana namun penuh dengan kebahagiaan.

Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari pencapaian besar atau kepemilikan materi, tetapi sering kali ditemukan dalam momen-momen sederhana dan hubungan yang mendalam. Dengan menyederhanakan hidup kita, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam dan sejati. Mari kita mulai menerapkan tujuh sikap ini dalam kehidupan sehari-hari dan rasakan perubahan positif yang mereka bawa. (Berbagai Sumber)



Rusuh Usai SYL ... (dari Hal 1)

MANTAN Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis 10 tahun penjara. Majelis hakim meyakini politikus NasDem itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pungli di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Menyatakan Terdakwa Syahrul Yasin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Menjatuhkan pidana terhadap Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun," tambah hakim.

Selain pidana badan, SYL juga dibebankan denda Rp 300 juta. Bila tidak dibayar, maka hukumannya diganti dengan 4 bulan kurungan.

Menurut Hakim, SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal itu terkait pungli/pemerasan.

SYL dinilai terbukti meminta uang dari para pejabat Kementan melalui Kasdi Subagyo sebagai Sekjen Kementan kala itu dan Muhammad Hatta selaku eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan. Nilai uang yang diterima SYL dkk sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30.000.

Namun, Hakim menilai bahwa dari total uang tersebut, ada yang memang dipergunakan untuk kepentingan dinas SYL. Misalnya sewa pesawat untuk kunjungan dinas, bantuan bencana alam dan pemberian sembako kepada masyarakat, hingga pembayaran kegiatan keagamaan.

Meski demikian, ada juga uang yang digunakan untuk pribadi SYL dan juga keluarganya. Seperti pembelian perhiasan dan mobil, sewa kendaraan perawatannya, pesta keluarga. Ada pula pemberian perhiasan kepada orang lain atas nama SYL.

Tak hanya itu, ada juga pemberian ke Partai NasDem. Salah satunya terkait bantuan untuk acara pendaftaran bacaleg NasDem di KPU dalam Pemilu 2024.

Hakim menilai bahwa total uang yang digunakan untuk keperluan pribadi SYL, keluarga dan koleganya adalah sebesar Rp 14.147.144.786 dan USD 30 ribu atau setara Rp 14,6 miliar.

Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana tambahan kepada SYL untuk membayar uang pengganti sebesar yang diterimanya itu. Dikurangi dengan jumlah uang yang sudah disita dan dirampas dalam perkara ini.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta agar SYL dihukum 12 tahun penjara.

Terpisah, Penasehat hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamiluddin Koedoeboen mengatakan pihaknya akan berpikir untuk mengajukan

banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Kami tim penasehat hukum pak SYL tadi telah berembuk bersama, berdiskusi, dan akhirnya pada satu kesimpulan untuk saat ini diberi kesempatan pikir-pikir dulu baru kemudian kami akan menentukan sikap," kata Djamil di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Dengan begitu, pihak SYL diberikan waktu selama 7 hari untuk menentukan sikap terhadap putusan itu.

Dalam sidang yang sama, Hatta dan Kasdi yang juga berstatus terdakwa turut menjalani vonis. Keduanya dihukum masing-masing 4 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa 6 tahun penjara.

SYL didakwa menerima sebesar Rp 44,5 miliar. Uang miliaran tersebut dipungut dari setoran parajajarannya pejabat eselon di Kementerian Pertanian.

Pungli dilakukan SYL dengan bantuan dua anak buahnya, yakni Kasdi Subagyo sebagai Sekjen Kementan kala itu dan Muhammad Hatta selaku eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan.

Dalam dalilnya, Jaksa KPK menyebut, sejak menjabat Menteri Pertanian pada Oktober 2019, SYL menempatkan beberapa orang kepercayaannya dalam jabatan tertentu di Kementan. Termasuk Kasdi dan Hatta.

Hatta merupakan staf SYL ketika menjabat Gubernur Sulawesi Selatan.

Hatta ditempatkan sebagai Pj Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan pada Juni 2020-2022 yang kemudian menjadi Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan sejak Januari 2023.

Selain Hatta, ada pula Imam Mujahidin Fahmid sebagai staf khusus Mentan. Sementara Kasdi belakangan dipromosikan SYL menjadi Sekjen Kementan. Tujuan pembangunan 'gerbong Sulawesi Selatan' ini dilakukan untuk memudahkan SYL memberikan perintah.

Pada awal tahun 2020, SYL mengumpulkan sejumlah anak buah di ruangan menteri.

Dia memerintahkan Imam, Kasdi sebagai Direktur Jenderal Perkebunan saat itu, Hatta dan Panji Harjanto (ajudan SYL), untuk melakukan pengumpulan uang 'patungan/sharing' dari para pejabat eselon I Kementan: para Dirjen, Kepala Badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I.

Besaran uang yang dipungut mulai dari USD 4.000-10.000. SYL juga disebut meminta jatah 20% dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan.

Dalam dakwaan, jaksa membeberkan bahwa permintaan tersebut dilakukan dengan disertai ancaman. SYL disebut pernah mengingatkan jajarannya, bila tak bisa memenuhi permintaan itu maka jabatan mereka dalam bahaya.

Total uang yang diraup SYL dari pungli, yang dilakukan melalui dua anak buahnya Kasdi dan Hatta itu, mencapai Rp 44,5 miliar. Meski belakang dalam tuntutan bertambah menjadi sekitar Rp 44,7 miliar. Namun, dalam vonis, Hakim meyakini yang dinikmati SYL, keluarga, dan koleganya adalah sebesar Rp 14,6 miliar.

Wartawan Ditendang

Di sisi lain, sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ricuh setelah hakim membacakan putusan. Wartawan yang mengalami tindakan kekerasan saat meliput melapor ke Polda Metro Jaya.

Pelapor merupakan salah seorang wartawan TV bernama Bodhiya Vimala. Laporan sudah teregister dengan nomor LP/B/3926/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA. Adapun materi yang dilaporkan adalah Pasal 170 KUHP tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.

"Bikin laporan, tadi ada suatu tindakan kurang mengesankan, kekerasan di PN Tipikor pas peliputan vonis SYL," kata Bodhiya di Polda Metro Jaya, Kamis (11/7/2024).

Dia mengatakan kerichuan terjadi saat para awak media hendak mengambil gambar setelah vonis SYL dibacakan di PN Tipikor. Saat itu ada beberapa orang diduga ormas pendukung SYL yang membuat kerichuan.

"Kita selesai sidang anak-anak TV blocking untuk ngambil doorstep akhir di persidangan. Terus ormas itu masuk nutupin pintu ruang sidang. Saat itu kondisi ruang sidang penuh dan mereka masuk menutup pintu keluar itu, berjejer," kata dia.

"Kita sebenarnya sudah sepakat sama ormas itu, karena anak-anak TV yang lain juga minta ngebuka jalanlah, supaya pas SYL keluar kita sama-sama dapat gambarnya. Tapi pas SYL keluar itu, mereka langsung desak-desakan keluar, dorong, akhirnya bikin rusuh suasana," imbuhnya.

Diduga ada tiga orang ormas yang terlibat dalam tindakan pengeroyokan yang terjadi. Bodhiya menyebut sempat ditendang anggota ormas tersebut saat kerichuan terjadi. Tak hanya itu, beberapa alat yang digunakan untuk liputan pun mengalami kerusakan.

"Lalu ormas itu datang ke saya, coba melakukan pemukulan dan penendangan itu. Ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Sampai ya itu, alat-alat semua juga ada kerusakan. Terus tadi ya gue jatuh, keinjak-injak, ketendang segala maceem karena salah satunya itu, kedorong karena melindungi alat," jelasnya.

Bodhiya menambahkan pihaknya turut melampirkan barang bukti terkait pelaporan yang ada. Dia meminta pihak kepolisian menyelidiki lebih dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan, Syahrul Yasin

Limpo kini sudah tidak lagi berstatus sebagai kader Partai Nasdem setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Ali mengatakan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem mengatur bahwa status keanggotaan kader berhenti dengan sendirinya bila ditetapkan sebagai terdakwa.

"Karena memang di internal begitu dia ditetapkan sebagai terdakwa itu otomatis langsung berhenti dengan sendirinya," ujar Ali Kamis (11/7/2024).

Ali mengeklaim, Nasdem tidak segan memecat kadernya yang terlibat berbagai perkara hukum, terutama korupsi.

Ia menyebutkan, jika status Syahrul sebagai kader tetap dipertahankan, hal itu akan menimbulkan pertanyaan publik dan menjadi preseden buruk bagi Partai Nasdem.

"Kalau enggak dipecat akan menimbulkan pertanyaan lain, ada apa diperlakukan berbeda dengan yang lain. Di aturan internal kita kan memang sudah jelas itu," kata Ali.

Ali menekankan, status keanggotaan kader Nasdem yang terjerat kasus korupsi semestinya tak perlu diperdebatkan. Ia pun menyebut bahwa SYL sudah mengajukan pengunduran diri.

"Artinya itu tidak perlu diperdebatkan karena sudah menjadi batu di internal Nasdem bukan hanya SYL, tapi semua yang terlibat kasus," kata Ali. "Setahu saya SYL sudah mengundurkan diri," imbu dia.

Media asing ramai-ramai mewartakan putusan persidangan SYL. Portal berita asal Singapura seperti The Straits Times dan Channel News Asia menyoroti SYL mengkorupsi uang negara untuk berfoya-foya seperti liburan pakai jet pribadi hingga membeli perhiasan mahal untuk istri.

The Straits Times juga menekankan bahwa SYL merupakan menteri kabinet Presiden Joko Widodo keenam yang terjerat korupsi.

"Limpo adalah menteri keenam dalam kabinet Presiden Joko Widodo yang terjerat korupsi," bunyi laporan The Straits Times.

Selain itu, kantor berita Malaysia, Bernama, dan portal berita New Straits Times juga mewartakan hal serupa.

Portal berita Australia, ABC News, juga ikut menyoroti vonis SYL dengan judul "Former Indonesian agriculture minister jailed for corruption".

"Limpo menggunakan uangnya untuk membeli mobil mewah, hadiah dan apartemen, menyewa jet pribadi, pesta dan pertemuan keluarga, serta untuk perayaan keagamaan dan ziarah. Limpo juga menggunakan suap tersebut untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana dan kepada partai politik Nasdem yang dipimpinnya," bunyi laporan ABC News. wid,r1s,tro,ant/dya)

Rusia-Ukraina Kembali Memanas, Para Sekutu Saling Ancam



Tim penyelamat bekerja di Rumah Sakit Anak Ohmatdyt yang rusak akibat serangan rudal Rusia, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di Kyiv, Senin (8/7/2024). (rtr)

MOSKOW-Rusia kembali melancarkan serangan terhadap tentara Ukraina di berbagai front. Ketegangan melebar hingga masing-masing negara-negara sekutunya.

Terbaru, Kerajaan Arab Saudi memberikan ancaman kepada Eropa jika negara-negara G7 menyita hampir US\$ 300 miliar atau setara Rp 4.863 triliun (kurs Rp 16.211) aset Rusia yang dibekukan. Ancaman yang diberikan yakni akan menjual sejumlah surat utang (obligasi) Eropa.

"Langkah tersebut, yang sedang dipertimbangkan untuk mendukung Ukraina, dipandang sebagai ancaman terselubung yang menunjukkan pengaruh diplomatik Kerajaan yang semakin besar di panggung dunia, menggarisbawahi meningkatnya kemampuannya untuk memengaruhi keputusan yang dibuat oleh beberapa ekonomi paling kuat di dunia," demikian laporan Bloomberg yang

dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (11/7/2024).

Untuk diketahui negara G7 itu terdiri dari, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kementerian Keuangan Kerajaan Arab Saudi pada awal 2024, telah mengatakan kepada beberapa rekan G-7 mengenai penolakan terhadap rencana penyitaan aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan itu.

Meskipun, alasan pembekuan itu dimaksudkan untuk mendukung Ukraina. Namun alih-alih mendukung Ukraina, ada informasi bahwa hal tersebut menjadi ancaman terselubung.

Diketahui Arab Saudi menginvestasikan puluhan miliar euro pada obligasi Prancis. Para pejabat Prancis pun mulai khawatir bahwa negara-negara lain akan mengikuti contoh yang dilakukan Saudi.

Terkait negara G7 yang berencana membantu Ukraina memang telah dibicarakan pada pertemuan puncak di Italia pada bulan Juni 2024 setelah berdiskusi selama berbulan-bulan.

Para pemimpin G7 menyepakati struktur keuangan yang akan memberi Ukraina bantuan sekitar US\$ 50 miliar dengan mengorbankan aset-aset Rusia yang dibekukan.

Tujuh negara anggota dan Uni Eropa saat itu juga telah sepakat untuk memberikan pinjaman yang akan dibayar kembali dengan hasil sekitar US\$ 280 miliar dana Rusia yang dibekukan, yang sebagian besar berlokasi di Eropa. Amerika Serikat dan Inggris mendukung penyitaan total. Namun Jepang dan Jerman menentang hal ini.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg menyatakan aliansi tersebut mengirim-

kan sebuah pesan yang kuat kepada China terkait dengan kerja sama negara Tirai Bambu itu dengan Rusia.

"Deklarasi yang kami setuju hari ini adalah pesan terkuat yang pernah dikirimkan oleh sekutu NATO tentang kontribusi China terhadap perang ilegal Rusia melawan Ukraina, sehingga itu merupakan pesan yang kuat," kata Stoltenberg dalam konferensi pers setelah hari pertama KTT NATO di Washington dikutip Kamis (11/7/2024).

Deklarasi KTT Washington secara khusus meminta China untuk menghentikan semua dukungan material dan politik terhadap upaya perang Rusia. Termasuk transfer material seperti komponen senjata, peralatan, dan bahan mentah yang menjadi input bagi sektor pertahanan Rusia.

Amerika Serikat telah lama menduga bahwa perusahaan-perusahaan China telah memberikan dukungan militer kepada Rusia, suatu klaim yang telah dibantah oleh kedua negara.

China mengatakan bahwa pihaknya adalah pihak yang netral dalam konflik Ukraina dan menekankan bahwa China tidak memanfaatkan konflik tersebut untuk menjual senjata kepada pihak mana pun.

Rusia telah melakukan operasi militer khusus di Ukraina sejak 24 Februari 2022. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun. Tujuan akhir dari operasi tersebut adalah untuk membebaskan Donbas dan menciptakan kondisi yang menjamin keamanan Rusia. (wis,anadolu, ist,rtr/dya)

Putin Bredel Moscow Times

DI SISI lain, Kantor Kejaksaan Agung Rusia pada Rabu (10/7/2023) memberedel surat kabar daring The Moscow Times. Laman perusahaan media ini diblokir di Rusia lantaran diduga menghina militer negara tersebut sesaat setelah Kremlin menginvasi Ukraina.

Kejaksaan Agung Rusia mengklasifikasikan The Moscow Times sebagai "organisasi berbahaya," dengan mengatakan kalau media itu mengganggu kepemimpinan Rusia.

Akibat keputusan ini, setiap pihak

yang bekerja sama atau berlangganan The Moscow Times dianggap sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara.

"Pekerjaan penerbitan ditujukan untuk mendiskreditkan keputusan kepemimpinan Rusia, baik kebijakan dalam dan luar negeri," tulis isi putusan tersebut.

Pada November 2023 silam, The Moscow Times sebenarnya telah masuk dalam daftar "agen asing".

Media Rusia lainnya seperti

Novaya Gazeta, Medusa, The Insider dan Istories juga diklasifikasikan sebagai kantor berita "berbahaya" dan dilarang.

Kejaksaan Agung Rusia menyatakan bahwa pelarangan ini diperlukan karena The Moscow Times bekerja sama dengan media-media tersebut.

Dalam sebuah pernyataan tertulis, The Moscow Times mengatakan kalau putusan tersebut "tidak mengejutkan" dan berjanji akan terus beroperasi. (Wid, Reuters, AP/Dya)

Kantor Kejaksaan Agung Rusia resmi memberedel surat kabar daring The Moscow Times. (Rtr)

